



Dari Ruang Privat ke Ruang Publik: Analisis Etika Komunikasi dan Peran Media Massa dalam Kasus Pelecehan Verbal di Grup WhatsApp

Badrul Helmi

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Tjuta Nyak Dhien, Indonesia

Penulis korespondensi: badrulhelmi@utnd.ac.id

Abstract. *This study analyzes the transformation of communication from private to public spaces in a verbal harassment case within a WhatsApp group, examining the role of mass media in framing the case amidst the context collapse phenomenon. Using a descriptive qualitative method with a media-based case study approach, data were collected from online news, media articles, and circulating digital documentation. Analysis was conducted through content analysis and simple framing techniques to unpack reality construction. The findings reveal that the illusion of digital privacy can easily collapse into public consumption through screenshots and social media virality. Ethical violations were identified in the form of verbal harassment and objectification disguised as humor, reflecting decreased ethical sensitivity and the normalization of toxic behavior in digital spaces. Mass media play a strategic role as information amplifiers and social reality constructors through framing processes that rapidly shape public opinion, sometimes leading to mass judgment. This study highlights the urgency of ethical awareness, communication responsibility, digital literacy, and institutional regulation in navigating the dynamics of the post-privacy era.*

Keywords: *Context Collapse; Digital Communication; Mass Media; Public Spaces; Verbal Abuse.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis transformasi komunikasi dari ruang privat ke ruang publik dalam kasus pelecehan verbal di grup WhatsApp, serta mengkaji peran media massa dalam membingkai kasus tersebut di tengah fenomena *context collapse*. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus berbasis media massa, data dikumpulkan dari berita daring, artikel media, dan dokumentasi digital yang beredar. Analisis dilakukan melalui teknik analisis isi dan pembingkai sederhana untuk membongkar konstruksi realitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilusi privasi digital dapat dengan mudah runtuh dan berubah menjadi konsumsi publik melalui mekanisme tangkapan layar dan viralitas media sosial. Ditemukan pelanggaran etika berupa pelecehan verbal dan objektifikasi yang dikemas sebagai candaan, mencerminkan penurunan sensitivitas etis serta normalisasi perilaku toksik di ruang digital. Media massa berperan strategis sebagai penguat informasi sekaligus konstruktor realitas sosial melalui proses pembingkai yang membentuk opini publik secara cepat dan determinatif, yang terkadang berujung pada penghakiman massal. Penelitian ini menegaskan urgensi kesadaran etika, tanggung jawab komunikasi, literasi digital, serta regulasi institusional dalam menavigasi dinamika era *post-privacy*.

Kata Kunci: *Context Collapse; Komunikasi Digital; Media Massa; Pelecehan Verbal; Ruang Publik.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah menempatkan media sosial sebagai ruang utama interaksi masyarakat modern, termasuk melalui platform percakapan tertutup seperti WhatsApp. Pengguna sering kali menganggap grup privat sebagai "ruang aman" yang bebas dari pengawasan publik, sehingga norma sosial dan etika komunikasi cenderung dilonggarkan (Zarouli et al., 2021). Namun, privasi dalam ruang digital bersifat semu (*pseudo-privacy*); batasan akses yang terbatas tidak sepenuhnya menjamin keamanan informasi karena konten di dalamnya rentan terhadap pendokumentasian dan penyebaran ulang tanpa izin (Calzada, 2023; Mita Baqis et al., 2025; Octaviona, 2026; Suari & Sarjana, 2023).

Ilusi keamanan ini memicu fenomena *context collapse*, di mana batas antara audiens privat dan publik runtuh, menyebabkan pesan yang awalnya ditujukan untuk kelompok terbatas dengan mudah dikonsumsi oleh khalayak luas (Octaviona, 2026). Dalam kondisi ini, kebebasan berekspresi sering kali disalahartikan sebagai ruang tanpa batas, memunculkan berbagai pelanggaran etika seperti pelecehan verbal yang dikemas sebagai candaan (Naing & Chan, 2024; Sayuti & Yanti, 2023; Tarigan & Felix, 2026). Ketiadaan isyarat nonverbal dalam komunikasi berbasis teks memperbesar potensi kesalahpahaman dan menormalisasi ujaran yang merendahkan martabat orang lain di ruang digital (Hayati & Sinha, 2024; Nurrahmi et al., 2026; Sibarani et al., 2024).

Transformasi dari ruang privat ke ruang publik terjadi secara cepat melalui mekanisme tangkapan layar (*screenshot*) dan fitur berbagi di media sosial (Wilken & Humphreys, 2021). Percakapan yang semula bersifat personal dan terbatas ini dengan mudah keluar dari konteks aslinya, memicu reaksi sosial yang luas, mulai dari kecaman publik hingga tekanan psikologis terhadap individu yang terlibat (Mavronicola & Pinto, 2025). Fenomena ini menegaskan bahwa kontrol atas informasi tidak lagi berada di tangan pengirim, melainkan tersebar di antara para penerima pesan yang memiliki akses terhadap konten digital tersebut (Octaviona, 2026).

Ketika isu privat ini terekspos, media massa mengambil peran strategis tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk opini publik melalui proses pembingkaihan (*framing*) (Juidah & Pratiwi, 2025; Kristianto et al., 2025). Media melakukan seleksi dan penekanan fakta tertentu yang secara tidak langsung mengonstruksi realitas sosial dan menentukan bagaimana masyarakat memandang suatu kasus pelanggaran etika (Fauzulhaq & Harwinda, 2025). Sebagai penguat (*amplifier*), pemberitaan media massa memperluas dampak dari kasus yang awalnya bersifat personal menjadi isu nasional yang menuntut respons institusional dan perhatian publik (Muklis et al., 2024).

Penelitian ini berangkat dari kasus pelecehan verbal yang terjadi di dalam grup WhatsApp, yang bertransformasi menjadi isu publik setelah tangkapan layar percakapan diviralkan dan diangkat oleh berbagai media massa. Fenomena ini memunculkan urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika etika komunikasi di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis proses transformasi komunikasi dari ruang privat ke publik, mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika yang muncul, serta menelaah peran dan pembingkaihan media massa dalam memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus berbasis media massa untuk memahami fenomena transformasi komunikasi dari ruang privat ke ruang publik secara mendalam. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi pada periode Januari hingga Maret 2026, yang mencakup berita daring dan dokumentasi digital terkait kasus pelecehan verbal di grup WhatsApp. Kriteria pemilihan sumber data dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel yang memuat kata kunci terkait seperti "pelecehan verbal", "grup WhatsApp viral", dan "etik digital"; (2) diterbitkan oleh portal berita nasional maupun regional yang kredibel; serta (3) memiliki substansi pembahasan mengenai dampak sosial, etika komunikasi, atau respons institusional terhadap kasus tersebut.

Berdasarkan kriteria inklusi tersebut, terkumpul total 18 artikel berita dari lima portal media massa (Medcom.id, Tribunnews, Kompas.com, Suara.com, dan Tribun Regional) yang memiliki karakteristik pemberitaan bervariasi, mulai dari edukatif, empatik, informatif, kritis, hingga sensasional. Selain pemberitaan media, data juga dilengkapi dengan dokumentasi digital berupa satu utas (*thread*) viral di platform X (Twitter) yang memicu amplifikasi publik, serta 12 tangkapan layar (*screenshot*) percakapan WhatsApp yang menjadi rujukan utama ekspos kasus. Rincian jumlah dan karakteristik data ini dipilih untuk memastikan representasi yang komprehensif mengenai bagaimana kasus tersebut dikonstruksi dan disebarkan dari ruang privat menuju konsumsi publik.

Untuk meningkatkan transparansi metodologi, teknik analisis data dilakukan melalui empat tahapan sistematis yang menggabungkan analisis isi (*content analysis*) dan analisis pembingkai (*framing analysis*). Tahap pertama adalah reduksi data melalui pembacaan berulang (*repeated reading*) terhadap seluruh artikel dan dokumentasi untuk mengidentifikasi unit makna yang relevan. Tahap kedua adalah pengkodean (*coding*) pada teks untuk menemukan pola, tema, dan kategori pelanggaran etika. Tahap ketiga menerapkan analisis *framing* sederhana untuk membongkar struktur narasi, sudut pandang dominan, dan nada pemberitaan yang digunakan media dalam mengonstruksi realitas sosial. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan secara kontekstual untuk menjawab rumusan masalah mengenai dinamika etika komunikasi dan peran media massa dalam membentuk opini publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Transformasi: Dari Ruang Privat Semu ke Konsumsi Publik

Proses transformasi komunikasi dari ruang privat menuju ruang publik dalam kasus ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang kompleks dan berlapis.

Awalnya, interaksi berlangsung di dalam grup WhatsApp beranggotakan 47 orang yang secara teknis dibatasi oleh daftar undangan tertentu, menciptakan ilusi keamanan bagi para partisipan. Namun, batasan akses ini terbukti rapuh ketika salah satu anggota—yang merasa dirugikan oleh isi percakapan—melakukan pendokumentasian berupa 12 tangkapan layar (*screenshot*) secara selektif pada tanggal 14 Januari 2026. Tindakan ini menjadi titik awal kebocoran informasi yang kemudian menyebar keluar dari lingkaran asli grup tersebut. Fenomena ini menegaskan bahwa privasi dalam ruang digital bersifat semu (*pseudo-privacy*), di mana kontrol atas informasi cepat hilang begitu konten didigitalkan dan disalin (Bruns, 2023).

Penyebaran informasi berlanjut ke platform media sosial terbuka ketika salah satu anggota grup mengunggah utas (*thread*) di platform X (Twitter) pada 15 Januari 2026 pukul 21.30 WIB. Data empiris menunjukkan bahwa utas tersebut memperoleh 1.847 repost, 5.230 likes, dan 412 kutipan dalam kurun waktu 24 jam pertama. Algoritma *For You Page* (FYP) di X dan Instagram kemudian mendorong konten ini masuk ke beranda pengguna yang tidak memiliki hubungan dengan grup asal, memperluas jangkauan audiens secara eksponensial. Di tahap ini, konteks asli percakapan sering kali terpotong atau mengalami distorsi karena disesuaikan dengan format konten media sosial yang singkat dan sensasional. Kecepatan penyebaran ini memicu apa yang disebut sebagai *context collapse*, di mana batas antara audiens privat dan publik runtuh secara total (Brandtzaeg & Lüders, 2018; Ruiz, 2026; Syukur et al., 2025). Akibatnya, pesan yang awalnya ditujukan untuk kelompok terbatas dikonsumsi oleh masyarakat luas tanpa filter etika yang memadai.

Puncak dari transformasi ini terjadi pada 17–19 Januari 2026 ketika lima portal media massa arus utama (Medcom.id, Tribunnews, Kompas.com, Suara.com, dan Tribun Regional) mulai mengangkat kasus tersebut sebagai berita nasional. Masuknya kasus ke dalam ranah jurnalisme memberikan legitimasi publik yang kuat, mengubah isu personal menjadi isu sosial yang menuntut respons institusional. Media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga memberikan kerangka interpretasi yang memengaruhi bagaimana masyarakat memahami peristiwa tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa dalam ekosistem digital modern, ruang privat tidak lagi dapat dianggap sebagai zona bebas dari pengawasan sosial. Setiap interaksi digital meninggalkan jejak yang berpotensi dieksploitasi untuk konsumsi publik kapan saja (Zarouli et al., 2021).

Tabel 1. Kronologi Transformasi Komunikasi dari Privat ke Publik.

Tahap	Peristiwa Kunci	Platform/Media	Dampak Sosial
1	Percakapan intensif dalam grup tertutup	WhatsApp	Dianggap sebagai ruang aman dan privat
2	Pendokumentasian via tangkapan layar	Internal Grup	Kebocoran informasi awal
3	Penyebaran perdana di media sosial	X (Twitter)	Viralitas awal dalam jaringan terbatas
4	Amplifikasi oleh pengguna luas	Instagram, TikTok	Peningkatan perhatian publik signifikan
5	Liputan media massa arus utama	Portal Berita Online	Legitimasi isu menjadi masalah nasional
6	Respons institusi dan investigasi	Kampus/Pihak Berwenang	Tindakan disipliner dan klarifikasi publik

Tabel 1 di atas menggambarkan lintasan kronologis bagaimana sebuah percakapan privat berevolusi menjadi isu publik. Setiap tahap menunjukkan peningkatan skala dampak, dimulai dari kepercayaan diri palsu dalam grup tertutup hingga tekanan sosial massal setelah liputan media. Data ini mengonfirmasi bahwa mekanisme penyebaran informasi digital bersifat kumulatif dan eksponensial, di mana setiap lapisan media baru menambah bobot serius pada kasus tersebut.

Anatomi Pelanggaran Etika: Pelecehan Verbal dalam Kedok Candaan

Analisis mendalam terhadap isi percakapan yang terekspos mengungkapkan adanya pola komunikasi yang secara jelas melanggar norma etika dasar, meskipun sering kali dibungkus dengan dalih humor atau candaan akrab. Temuan menunjukkan penggunaan bahasa yang bersifat objektifikasi tubuh, ujaran merendahkan martabat, dan pelecehan verbal yang terselubung. Para pelaku cenderung memanfaatkan ketiadaan isyarat nonverbal dalam komunikasi berbasis teks untuk menyampaikan pesan-pesan yang agresif tanpa merasa langsung berhadapan dengan reaksi emosional korban. Hal ini mencerminkan penurunan sensitivitas etika di ruang digital, di mana kebebasan berekspresi disalahartikan sebagai kebebasan dari tanggung jawab moral (Nasrullah, 2015).

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling menonjol adalah normalisasi kekerasan verbal melalui mekanisme "candaan". Dalam konteks grup yang homogen, anggota kelompok sering kali merasa tertekan untuk ikut serta atau menertawakan ujaran ofensif agar tidak dikucilkan secara sosial. Fenomena ini menciptakan budaya permisif di mana pelecehan dianggap sebagai bagian dari dinamika pertemanan, bukan sebagai tindakan merugikan. Padahal, dampak psikologis dari ujaran tersebut tetap nyata, terutama ketika konteks "candaan" tersebut dicabut dan dilihat oleh khalayak luar yang tidak memiliki ikatan emosional dengan grup tersebut (Hasbollah et al., 2019).

Pelanggaran etika ini juga diperparah oleh adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam struktur grup, di mana individu dengan status sosial lebih tinggi merasa berhak menggunakan

bahasa yang dominan dan merendahkan. Dokumentasi digital menunjukkan bahwa korban sering kali diam atau hanya merespons dengan emoji karena takut menghadapi konsekuensi sosial jika menolak. Ketika percakapan ini menjadi publik, masyarakat luas dengan cepat mengidentifikasi unsur pelecehan yang sebelumnya dinormalisasi di dalam grup. Hal ini menegaskan bahwa standar etika publik berbeda dengan norma informal yang berkembang di ruang privat tertutup.

Tabel 2. Kategori Pelanggaran Etika Komunikasi dalam Kasus.

No	Bentuk Ujaran/Konten	Kategori Pelanggaran	Dampak Potensial bagi Korban
1	Candaan bernuansa seksual eksplisit	Pelecehan Verbal	Rasa malu, trauma, dan penurunan harga diri
2	Objektifikasi fisik anggota grup	Pelecehan Gender	Merasa diperlakukan sebagai objek, bukan subjek
3	Penggunaan kata-kata vulgar dan kasar	Pelanggaran Kesantunan	Normalisasi kekerasan verbal dalam interaksi
4	Ejekan kolektif terhadap individu tertentu	<i>Toxic Communication</i>	Isolasi sosial dan tekanan mental berkepanjangan

Tabel 2 mengklasifikasikan jenis-jenis ujaran yang ditemukan dalam dokumentasi kasus ke dalam kategori pelanggaran etika yang spesifik. Klasifikasi ini penting untuk membedakan antara kebebasan berekspresi yang sah dengan tindakan pelecehan yang merugikan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran bersifat sistemik dan berulang, bukan sekadar kesalahan tunggal, yang menunjukkan adanya budaya komunikasi yang toksik dalam grup tersebut.

Konstruksi Realitas: Peran *Framing* Media Massa

Media massa memainkan peran sentral tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai konstruktor realitas sosial melalui proses pembingkaihan (*framing*). Dalam perspektif Robert Entman, *framing* didefinisikan sebagai proses "menyeleksi beberapa aspek dari realitas yang dipersepsikan dan membuatnya lebih menonjol" untuk mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan menawarkan rekomendasi solusi. Dalam kasus ini, analisis terhadap lima portal berita menunjukkan bahwa setiap media melakukan seleksi dan penonjolan aspek yang berbeda dari peristiwa yang sama, sehingga menghasilkan konstruksi realitas yang bervariasi (Fauzulhaq & Harwinda, 2025).

Pemberitaan media juga berfungsi sebagai *amplifier* yang memperbesar dampak dari kasus yang awalnya bersifat lokal. Dengan menempatkan kasus ini di halaman utama atau bagian *trending*, media memberikan sinyal kepada publik bahwa isu ini penting dan mendesak untuk dibahas. Judul-judul berita yang menggunakan diksi kuat seperti "viral", "skandal", atau "tekanan mental" dirancang untuk menarik klik (*click-worthy*) dan memicu keterlibatan emosional pembaca. Strategi *framing* ini, meskipun efektif dalam meningkatkan trafik,

berisiko mengurangi kompleksitas kasus menjadi narasi hitam-putih yang simplistik (Muklis et al., 2024).

Selain itu, media massa bertindak sebagai agen *agenda setting* yang menentukan aspek mana dari kasus yang mendapat perhatian publik. Misalnya, *framing* yang dipilih Tribunnews dan Suara.com memicu diskusi publik tentang tanggung jawab institusi pendidikan, sementara *framing* Medcom.id dan Kompas.com lebih banyak menghasilkan diskusi konstruktif tentang literasi digital. Variasi *framing* ini menunjukkan bahwa realitas publik yang terbentuk sangat bergantung pada pilihan editorial media, bukan semata-mata pada fakta mentah peristiwa tersebut. Dengan demikian, teori *framing* Entman terbukti relevan dalam menjelaskan bagaimana media tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi secara aktif mengonstruksinya melalui seleksi dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari peristiwa yang diberitakan.

Tabel 3. Analisis Komparatif *Framing* Pemberitaan Media.

No	Media Massa	Fokus Utama (<i>Frame</i>)	Nada Pemberitaan	Sudut Pandang Dominan
1	Medcom.id	Edukasi dan Definisi Pelecehan	Edukatif & Analitis	Umum/Publik
2	Tribunnews	Dampak Psikologis Korban	Empatik & Humanis	Korban
3	Kompas.com	Kronologi Fakta Kejadian	Informatif & Netral	Fakta Objektif
4	Suara.com	Kritik Sosial dan Tanggung Jawab	Kritis & Investigatif	Masyarakat Sipil
5	Tribun Regional	Profil Pelaku dan Institusi	Sensasional	Institusi

Tabel 3 menyajikan perbandingan bagaimana lima media massa berbeda membingkai kasus yang sama. Perbedaan fokus dan nada pemberitaan menunjukkan diversitas strategi komunikasi media dalam menarik *audiens*. Bingkai edukatif cenderung menghasilkan diskusi yang lebih konstruktif, sedangkan bingkai sensasional sering kali memicu polarisasi opini dan emosi negatif di kalangan pembaca.

Amplifikasi Informasi dan Dinamika Opini Publik

Peran media massa dalam kasus ini melampaui fungsi informatif tradisional; mereka bertindak sebagai katalisator yang mempercepat pembentukan opini publik. Setelah informasi bocor ke media sosial, masuknya verifikasi dan liputan dari media terpercaya memberikan validasi yang membuat isu tersebut tidak bisa lagi diabaikan oleh institusi terkait. Proses ini menciptakan siklus umpan balik di mana perhatian media meningkatkan tekanan sosial, yang pada gilirannya memaksa respons lebih cepat dari pihak berwenang. Tanpa amplifikasi media, kasus semacam ini mungkin hanya akan tetap menjadi gosip internal tanpa konsekuensi struktural yang berarti (Muklis et al., 2024).

Dinamika opini publik yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh kecepatan penyebaran informasi dan kedalaman analisis yang disajikan media. Di era digital, publik cenderung membentuk penilaian awal berdasarkan judul berita atau cuplikan singkat sebelum membaca laporan lengkap. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena "penghakiman instan" di mana individu yang terlibat sudah divonis bersalah atau tidak bersalah oleh netizen sebelum proses investigasi resmi selesai. Media memiliki tanggung jawab etis untuk mitigasi dampak ini dengan menyajikan informasi yang berimbang dan menghindari bahasa yang provokatif.

Selain itu, interaksi antara media massa dan media sosial menciptakan ruang diskusi publik yang luas namun sering kali tidak terkendali. Komentar pembaca di bawah artikel berita sering kali menjadi wadah bagi ekspresi kemarahan, dukungan, atau bahkan pelecehan lanjutan terhadap pihak yang terlibat. Media massa, dengan menyediakan platform komentar, secara tidak langsung memfasilitasi partisipasi publik dalam narasi kasus. Oleh karena itu, pemahaman tentang literasi digital menjadi krusial bagi masyarakat untuk mampu menyaring informasi dan berpartisipasi dalam diskusi publik secara sehat dan etis.

Implikasi Etika dan Urgensi Literasi Digital di Era *Post-Privacy*

Temuan penelitian ini membawa implikasi etika yang mendalam bagi praktik komunikasi digital di masa depan, khususnya dalam memahami konsep "*post-privacy*" atau era di mana privasi mutlak hampir mustahil dicapai. Individu harus menyadari bahwa setiap pesan yang dikirimkan melalui perangkat digital, seprivat apapun rupanya, memiliki potensi permanen untuk diakses publik. Kesadaran ini menuntut perubahan paradigma dari mengandalkan keamanan teknis platform menuju tanggung jawab pribadi dalam setiap interaksi. Etika komunikasi tidak lagi hanya soal sopan santun tatap muka, tetapi juga soal manajemen jejak digital dan perlindungan data pribadi orang lain.

Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan literasi digital yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan kritis. Literasi digital harus mencakup kemampuan untuk memahami konsekuensi sosial dari berbagi informasi, mengenali bentuk-bentuk pelecehan halus, dan menghargai batas privasi orang lain. Institusi pendidikan dan organisasi perlu mengintegrasikan modul etika digital ke dalam kurikulum atau pelatihan mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah normalisasi perilaku toksik di ruang tertutup dan membekali individu dengan keterampilan navigasi yang bertanggung jawab di dunia maya.

Terakhir, penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi dan kebijakan institusional yang responsif terhadap pelanggaran etika di ruang digital. Institusi tidak boleh lagi menganggap urusan grup *chat* sebagai hal privat yang di luar yurisdiksi mereka jika dampaknya merusak reputasi atau keselamatan anggota komunitas. Perlu adanya protokol jelas mengenai

penanganan keluhan pelecehan digital dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dengan demikian, ruang digital dapat diubah dari wilayah bebas hukum menjadi ruang sosial yang teratur, aman, dan menghargai martabat manusia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa batas antara ruang privat dan publik dalam komunikasi digital telah mengalami erosi signifikan. Kasus pelecehan verbal di grup WhatsApp ini menjadi studi kasus ideal yang memperlihatkan bagaimana privasi semu dapat dengan mudah ditembus oleh teknologi dokumentasi dan algoritma media sosial. Pelanggaran etika yang terjadi tidak dapat dibenarkan dengan alasan konteks privat, karena dampak sosialnya nyata dan luas. Media massa, melalui mekanisme *framing* dan amplifikasi, berperan ganda sebagai penyebar informasi dan pembentuk opini publik yang menentukan arah resolusi kasus.

Temuan ini sejalan dengan teori *context collapse* yang menyatakan bahwa runtuhnya batas *audience* mengubah dinamika komunikasi secara fundamental. Ketika konteks privat hilang, norma-norma publik berlaku, dan pelanggaran terhadap norma tersebut mendapatkan sanksi sosial yang berat (Li, 2020). Oleh karena itu, solusi jangka panjang tidak hanya terletak pada hukuman bagi pelaku, tetapi pada pembangunan budaya komunikasi digital yang etis. Literasi digital, tanggung jawab individu, dan peran media yang profesional adalah kunci untuk menavigasi kompleksitas era digital ini.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya pemahaman tentang etika komunikasi dalam konteks *Computer Mediated Communication* (CMC) di Indonesia. Dengan menggunakan referensi terkini tahun 2020–2026, analisis ini relevan dengan kondisi teknologi dan sosial saat ini. Hasilnya menyarankan perlunya pendekatan multidisiplin dalam menangani kasus serupa, melibatkan ahli komunikasi, psikolog, ahli hukum, dan praktisi media. Hanya dengan kolaborasi semacam itu, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih manusiawi dan beradab.

Sebagai penutup, dinamika yang terungkap dalam penelitian ini menegaskan bahwa teknologi adalah alat netral, namun penggunaannya sarat dengan nilai dan konsekuensi etis. Setiap klik, setiap kiriman pesan, dan setiap pembagian konten adalah tindakan sosial yang memiliki dampak riil. Kesadaran akan hal ini harus menjadi fondasi utama dalam setiap interaksi digital. Dengan demikian, transformasi dari ruang privat ke publik tidak selalu harus berakhir dengan konflik, tetapi dapat dikelola dengan bijak melalui prinsip-prinsip etika komunikasi yang kuat.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa batas antara ruang privat dan publik dalam ekosistem digital bersifat semu, di mana interaksi tertutup seperti grup WhatsApp memiliki kerentanan tinggi untuk bocor dan bertransformasi menjadi konsumsi publik melalui mekanisme dokumentasi dan viralitas. Pelecehan verbal yang terjadi di dalam ruang privat, meskipun kerap dibungkus sebagai candaan akrab, tetap merupakan pelanggaran etika komunikasi yang membawa konsekuensi sosial nyata. Selain itu, media massa memegang peran strategis sebagai *amplifier* dan konstruktor realitas; melalui proses pembingkaihan (*framing*), media tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga secara cepat dan determinatif membentuk opini serta persepsi kolektif masyarakat terhadap kasus yang semula bersifat personal.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar individu meningkatkan literasi digital dan kesadaran etika, dengan menyadari bahwa setiap jejak komunikasi di ruang maya memiliki potensi eksposur publik sehingga menuntut tanggung jawab moral dalam memproduksi maupun mendistribusikan informasi. Institusi pendidikan diharapkan dapat merumuskan regulasi dan edukasi etika digital yang preventif untuk mencegah normalisasi perilaku komunikasi yang toksik. Sementara itu, media massa perlu menjaga profesionalisme jurnalistik dengan menyajikan pembingkaihan berita yang proporsional dan berimbang, guna menghindari bias berlebihan atau potensi penghakiman massal (*trial by the press*) yang dapat memperparah dampak psikososial bagi pihak-pihak yang terdampak.

DAFTAR REFERENSI

- Brandtzaeg, P. B., & Lüders, M. (2018). Time Collapse in Social Media: Extending the Context Collapse. *Sage Journal*. <https://doi.org/10.1177/2056305118763349>
- Bruns, A. (2023). From “the” public sphere to a network of publics: towards an empirically founded model of contemporary public communication spaces. *Communication Theory*, 33(2–3), 70–81. <https://doi.org/10.1093/CT/QTAD007>
- Calzada, I. (2023). Disruptive Technologies for e-Diasporas: Blockchain, DAOs, Data Cooperatives, Metaverse, and ChatGPT. *Futures*, 154, 103258. <https://doi.org/10.1016/J.FUTURES.2023.103258>
- Fauzulhaq, G., & Harwinda, A. (2025). Diplomasi dalam Bingkai Media: Analisis Framing Pemberitaan Keanggotaan Indonesia di BRICS. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 9(4), 2134–2144.
- Hasbollah, N. S., Rashid, Mohd. M., & Ihwani, S. S. (2019). *Media Sosial dan Dampak Menurut Islam*. 8(2014), 17–32. http://eprints.utm.my/85126/1/17MuhammadFairmanHaronzah2020_MediaSosialFacebookMenurutIslam.257-276.pdf

- Hayati, D., & Sinha, S. (2024). Decoding Silence in Digital Cross-Cultural Communication: Overcoming Misunderstandings in Global Teams. *Language, Technology, and Social Media*, 2(2), 128–144. <https://doi.org/10.70211/LTSM.V2I2.60>
- Juidah, I., & Pratiwi, V. U. (2025). CNN Indonesia's Framing Strategy in Influencing Public Opinion. *J-LELC: Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, 5(1), 21–33. <https://doi.org/10.25299/j-lelc.2025.21607>
- Kristianto, A., Kassapa, K., Agustin, D., Safitri, D., Ajat, A., & Kasrah, R. (2025). The Influence of Mass Communication Intensity on the Formation of Public Opinion Among Voters in the 2024 Presidential Election in Indonesia. *Journal of Communication, Religious, and Social Sciences (JoCRSS)*, 3(2), 93–103. <https://doi.org/10.60046/JOCRSS.V3I2.251>
- Li, T. C. (2020). Privacy in Pandemic: Law, Technology, and Public Health in the COVID-19 Crisis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3690004>
- Mavronicola, N., & Pinto, M. (2025). Challenging punishment as the justice norm in the face of ongoing atrocities. *Leiden Journal of International Law*, 38(4), 905–932. <https://doi.org/10.1017/S0922156525100460>
- Mita Baqis, A., Irwan, M., & Nasution, P. (2025). Pentingnya Perlindungan dan Keamanan Data Privasi di Era Digital. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 396–404. <https://doi.org/10.61132/JMPAI.V3I3.1150>
- Muklis, M. C., Siregar, M., Ahli Fraksi, S., & Kabupaten Kutai Barat, P. (2024). PERAN MEDIA MASSA DALAM KEBIJAKAN PUBLIK. *JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK*, 4(2), 133–140. <https://doi.org/10.30742/JUISPOL.V4I2.4159>
- Naing, A., & Chan, N. (2024). Freedom Of Expression In The Digital Age: Balancing Rights and Responsibilities. *Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights*, 1(2), 29–34. <https://doi.org/10.62383/ICLEHR.V1I2.26>
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nurrahmi, N., Akma, M., Pohan, A. L., Aprianti, R., & Darmawati. (2026). An Analysis of the Role of Verbal and Nonverbal Communication in Preventing Misunderstandings in Social Interactions in the Digital Era. *Jurnal Ilmu Komunikasi Balayudha*, 6(1), 01–11. <https://jurnal.uss.ac.id/index.php/jikoba/article/view/766>
- Octaviona, T. (2026, April 17). *Ruang Privat yang Semu: Ketika Group Chat Menjadi Locus Delicti dalam Kasus Pelecehan Seksual*. <https://alchemistgroup.co/article/group-chat-bukan-ruang-privat-hukum>
- Ruiz, C. D. (2026). Echo chamber dynamics on social media. *New Media & Society*. <https://doi.org/10.1177/14614448261441872>
- Sayuti, S., & Yanti, I. (2023). Freedom of Speech Without a Direction: Criticism of Promotion of Freedom of Speech in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 121–144. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1389>
- Sibarani, C. V., Marbun, W., & Hartati, R. (2024). Feedback and Literacy: Investigating the Mediating Role of Ambiguity in texting communication. *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa Dan Sastra Inggris*, 2(4), 184–200. <https://doi.org/10.61132/fonologi.v2i4.1230>

- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/JAH.V6I1.4484>
- Syukur, Abd., Fadilla, A., Kifli, H. N., Selti, I. T. A., Mubaraq, M. D. A. N., & Hidayati, N. (2025). PERAN LITERASI MEDIA DALAM MEMERANGI BERITA HOAX PADA MEDIA SOSIAL. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 823–836. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1678>
- Tarigan, R. S., & Felix, A. (2026). The Abuse of Freedom of Speech in the Digital Era: Social Media in the Perspective of Constitutional Law. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(4), 2505–2521. <https://doi.org/10.38035/JLPH.V6I4.3248>
- Wilken, R., & Humphreys, L. (2021). Placemaking through mobile social media platform Snapchat. *Convergence*, 27(3), 579–593. <https://doi.org/10.1177/1354856521989518;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATIO N>
- Zarouli, B., Brosius, A., Helberger, N., & Devreese, C. (2021). WhatsApp Marketing: A Study on WhatsApp Brand Communication and the Role of Trust in Self-Disclosure. *International Journal of Communication*, 15, 252–276. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/15365/3318>